

KALA KPK- TNI 'EKER-EKERAN' AWAS KASUS BASARNAS LEPAS

Kisruh penanganan kasus dugaan korupsi di Basarnas berdampak pada kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Desakan agar Firli Bahuri dan pimpinan lain di KPK saat ini mundur menguat kembali. Tak berhenti di situ, Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan tak menerapkan perpajangan masa jabatan KPK jadi 5 tahun kepada Firli. Diketahui, dalam OTT di Basarnas, ada lima orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Kelima tersangka itu terdiri atas tiga pihak swasta selaku pemberi suap dan dua oknum TNI masing-masing Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto selaku penerima suap. Pengumuman tersangka kepada dua anggota TNI itu direspons pihak Puspom TNI. Mereka keberatan atas langkah yang dilakukan KPK. Sebab, penetapan tersangka oleh KPK dalam hal ini keliru. Penetapan tersangka hanya bisa dilakukan oleh Puspom TNI karena statusnya masih perwira aktif. Padahal, saat OTT penyidik KPK menemukan uang Rp 999,7 juta. Selain itu keduanya juga diduga menerima suap senilai Rp 4,1 miliar. Duh!

(Baca Hal 11)

**Government (Hal.2)
Didesak Direvisi,
Menteri Nadiem
Bersikukuh
Lanjutkan Zonasi**

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

**DASAR HUKUM TERKAIT
TINDAK PIDANA DI TNI**

UU 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

Pasal 69 UU Peradilan Militer, dijelaskan penyidik adalah atasan yang berhak menghukum (ankum), polisi militer dan oditur. Sementara penyidikan dijelaskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Pasal 71 ayat 1 mengatur sejumlah kewenangan penyidik di antaranya menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti hingga melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat hingga penahanan. Yang melakukan penahanan itu ada tiga. Pertama adalah Anikum, atasan yang berhak menghukum. Kedua adalah Polisi Militer.

KILAS PERISTIWA TENTANG SEJUMLAH PERWIRA TNI YANG TERLIBAT KORUPSI



1. MARSMA FACHRY ADAMY

Lelaki yang pernah menjabat Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara itu sempat disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101. Dalam perjalanannya, Puspom TNI justru menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kelima perwira TNI AU itu, termasuk Fachry



2. BRIGJEN TEDDY HERNAYADI

Teddy divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari TNI dalam kasus korupsi penyelewengan dana pembelian pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache periode 2010 sampai 2014, senilai 12,4 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 146 miliar. Vonis itu dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II pada 30 November 2016.



3. LAKSMA BAMBANG UDOYO

Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Militer Jakarta menjatuhkan vonis penjara 4 tahun 6 bulan terkait kasus suap proyek satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Vonis itu dibacakan pada 20 Desember 2017 silam.



Kisruh Sistem PPDB

Didesak Direvisi, Menteri Nadiem Bersikukuh Lanjutkan Zonasi

JAKARTA-Ucapan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang menyebut bahwa kebijakan PPDB Zonasi bukan idenya, namun dari Muhadjir Effendy menuai polemik. Banyak pihak menyangkan pernyataan itu. Tak mau polemik itu terus membesar, Nadiem meluruskan mispersepsi tentang pernyataannya.

Dalam keterangan resminya, Minggu (30/7/2023), Nadiem Makarim menyatakan bila dirinya mengapresiasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang telah menginisiasi program PPDB zonasi saat menjabat sebagai Mendikbud.

Nadiem mengatakan, PPDB sistem zonasi ini dibuat dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk dapat bersekolah di dekat rumahnya. Sehingga, menciptakan gerakan gotong royong dalam membangun sekolah bersama-sama dengan tenaga kependidikan, komite sekolah, dan seluruh warga sekolah.

"Segala daya dorong yang selama ini telah Bapak (Menko PMK) lakukan untuk pendidikan Indonesia akan selalu tercatat dalam sejarah untuk kebaikan anak-anak Indonesia," tuturnya, Minggu (30/7/2023). Nadiem pun berkomitmen untuk tetap melanjutkan sistem seleksi tersebut pada tahun depan.

Pasalnya, sebelum ada kebijakan ini, banyak orang tua peserta didik yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk ke sekolah favorit. Belum lagi, ada peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu, tapi harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri.

"Zonasi adalah contoh 'legacy' kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan. Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan, dan itu enggak masalah," jelasnya saat menjadi pembicara di salah satu acara pendidikan, di Posbloc, Jakarta, Sabtu (29/7/2023).

Nadiem Makarim mengakui setiap dirinya mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan kerap kali di protes masyarakat. Menurutnya dunia pendidikan merupakan dunia yang tidak mudah untuk menyambut perubahan. Sebab, ketika kebijakan diterapkan di sektor ini maka jutaan orang akan terdampak, bingung hingga kesal. Oleh karenanya, setiap Nadiem mengeluarkan kebijakan setidaknya akan mengalami protes, bahkan dengan nada bercanda Mendikbud menyebutkan ini sudah



Sejumlah guru uji coba soal PPDB online 2023 di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023). (dok.ist)

termasuk dalam SOP-nya. "Tetapi yang membuat saya paling semangat adalah kalau kita bisa melewati fase ributnya dulu kan setiap kali saya membuat kebijakan ribut dulu kan itu juga jelas ini udah standar la, ini SOP-nya," kata Nadiem.

Dia juga mengklaim bahwa kebijakan yang paling bagus dan mulia seperti mendorong guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap saja menuai kritik. Kendati demikian, dirinya tetap termotivasi untuk membuat perubahan setelah terjun langsung ke lapangan. Realitanya, kata Nadiem, dia menemukan fakta yang berbeda di lapangan dengan isu yang muncul di media sosial.

"Jadi satu hal yang membuat saya termotivasi adalah saya menyadari serangan sosmed sama kondisi di lapangan itu tidak pernah sama jadi kalau saya turun langsung ngobrol dengan guru-guru dan kepala sekolah itu sangat berbeda isu-isunya dengan yang dikeluarkan di sosmed itu loh jadi saya suka tergelitik," jelas Nadiem.

DPR Minta Perketat Pengawasan

Di sisi lain, personel Komisi X DPR RI mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim mengawal kebijakan PPDB zonasi. Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dinilai relatif bagus. Masalahnya ada

pada pengawasan yang masih lemah. "Mas Menteri Nadiem seharusnya mengamankan kebijakan sistem zonasi yang dibuat menteri pendulunya, Prof Dr Muhadjir Effendy karena sistem ini relatif bagus. Kekacauan yang terjadi di lapangan saat ini menggambarkan lemahnya pengawasan," kata Prof Dr Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN dalam keterangannya, Minggu (30/7).

Jika merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure, lanjutnya, maka kewajiban menteri sekarang memperbaiki. Dia menilai polemik PPDB zonasi yang terjadi sekarang karena pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan. Selain itu, upaya pemahaman kepada masyarakat yang kurang sehingga Prof. Zainuddin menilai tidak elok jika menyalahkan sistem zonasinya.

"Saya rasa tidak akan ada atau sedikit-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB itu disosialisasikan dengan baik," tegas mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menyoroiti sengkabut permasalahan PPDB sistem zonasi. Dia meminta Kemendikbud melakukan perbaikan dengan mencari solusi dari polemik yang terjadi. "Kalau

setiap tahun permasalahan ini selalu terjadi, perlu ada perbaikan. Dan kami beri waktu sampai Oktober ini, jika masih belum ketemu solusi, maka ubah sistemnya," kata Dede Yusuf dalam keterangannya.

Dede pun mengusulkan penerimaan siswa baru dikembalikan seperti sistem pendaftaran sekolah terdahulu, yakni seleksi berdasarkan nilai hasil ujian akhir sekolah seperti saat masih ada NEM (Nilai EBTANAS Murni). Namun sistem seperti ini diselaraskan dengan kebutuhan di masing-masing daerah.

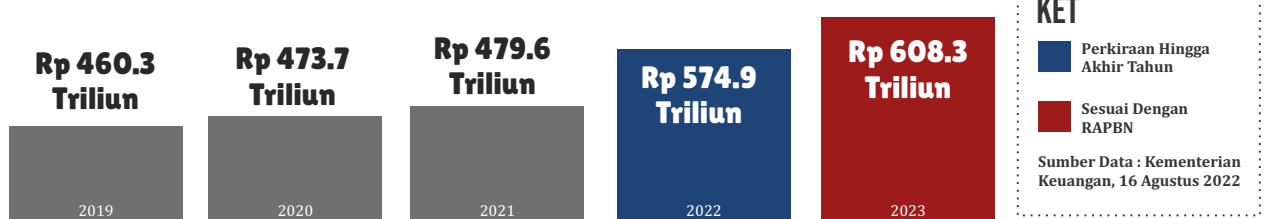
"Maka kita akan minta segera membuat sistem baru yang lebih mengedepankan azas dan hak ke testing (ujian), misalnya bisa kembali kepada sistem 'NEM', namun testing-nya itu hanya buat pendaftar-pendaftar yang non-zonasi," ujarnya. "Jadi sistem zonasi-nya masih tetap ada, ya zonasi bisa berkurang lah menjadi 20%, lalu ada sistem prestasi, itu non-akademik," imbuhnya.

Selain pengembalian sistem, Dede juga meminta pemerintah mempertimbangkan untuk mengambilalih tanggung jawab terhadap siswa-siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Seperti dengan memberi bantuan dana atau subsidi untuk siswa yang akhirnya terpaksa bersekolah di sekolah swasta, khususnya bagi anak dari keluarga kurang mampu.

"Karena banyak sekali keluarga yang terjebak pada masalah biaya pendidikan setelah anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Jadi boleh bersekolah di swasta tapi dibiayai oleh negara, itu opsi yang lebih kuat lagi, tetapi nanti ujung-ujungnya adalah kemampuan anggaran negara harus siap," tutur Dede.

Melihat kompleksnya persoalan penerimaan siswa baru, Komisi X DPR tengah mempertimbangkan dibentuknya panitia kerja (panja) PPDB. Selain untuk mencari solusi terkait sistem penerimaan siswa baru, menurut Dede, Panja PPDB juga bisa bekerja menangani banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum tertentu. (wid,ant,rls/dya)

ANGGARAN PENDIDIKAN DARI MASA KE MASA



Koalisi Sipil Sebut Puan Jegal Lagi Pembahasan RUU PPRT di DPR RI



Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk UU PPRT menggelar aksi teaterikal di depan gedung DPR, Jakarta. (dok.ant)

JAKARTA- Daftar Isian Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sudah ada di meja Ketua DPR RI, Puan Maharani sejak 3 bulan lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda pebentukan tim untuk pembahasan lebih lanjut.

"DIM dari pemerintah yang sudah masuk sejak 16 Mei itu enggak direspons oleh dia, didiamkan saja. Malah dia kemudian mengagendakan yang belakangan-belakangan. Ini ngganjel lagi," ujar Koordinator Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) Eva Kusuma, dikutip Minggu (30/7/2023).

Eva mengatakan DPR seharusnya menganut sistem first in first out atau usulan RUU yang pertama masuk, maka harus dibahas lebih dahulu untuk disahkan menjadi UU. Posisi RUU PPRT, kata Eva, ada di antrean awal untuk disahkan karena sudah 19 tahun lalu sejak diusulkan pertama kali menjadi undang-undang.

Namun, Eva mengatakan pada kenyataannya RUU PPRT tak kunjung disahkan dan justru disalip oleh beberapa RUU yang usulannya baru diajukan, seperti RUU Kesehatan hingga RUU Omnibus Law. Eva khawatir RUU PPRT tidak akan dibahas di DPR hingga masa jabatan Puan habis pada 2024.

Jika sudah lewat periode saat ini, Eva mengatakan maka proses pengesahan RUU PPRT akan kembali mengulang dari awal. Sebab DPR periode selanjutnya, kata dia, tidak akan menerima lanjutan tugas dari periode saat ini. RUU PPRT ini bisa jadi 20 tahun tak disahkan," kata Eva.

dalam UU PPRT. Dari jumlah tersebut, Edward mengatakan 79 DIM di antaranya merupakan substansi baru. "Ini akan menjadi fokus kita," ujar Eddy.

Usai temuan ratusan DIM tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan pemerintah selanjutnya bakal menandatangani DIM tersebut dan menyerahkannya secara formil ke DPR RI. Setelah diserahkan pada 16 Mei 2023, harapannya RUU PPRT sudah dapat dibahas di DPR satu pekan kemudian.

Eddy menjelaskan secara substansi RUU PPRT pada prinsipnya mengatur dua hal baru, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Eddy mengatakan RUU PPRT juga mengatur mengenai hak dan kewajiban PRT, seperti hak atas istirahat, upah, jaminan sosial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta makanan dan akomodasi yang layak, serta beberapa hal penting lain yang akan menjadi bentuk perlindungan dan pemenuhan PRT. "Selain itu, RUU PPRT juga akan memberikan aspek perlindungan kepada Pemberi Kerja," kata Eddy.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar Tim Pelaksana Percepatan UU PPRT segera melakukan komunikasi politik dan komunikasi publik, baik secara formal maupun non formal. Menurut dia, komunikasi politik secara intensif dengan DPR sangat dibutuhkan agar pembahasan UU PPRT berjalan mulus.

Selain itu, Moeldoko meminta agar

tim juga harus melakukan pendekatan khusus kepada simpul-simpul masyarakat sipil yang mengawal UU PPRT. "Jangan sampai ada kesan lahirnya Undang-Undang ini (UU PPRT) tanpa ada peran masyarakat sipil," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Koordinator Aksi Jala PRT, Lita Anggraini, terus mengungkap nasib PRT yang memprihatinkan. Dia menyebut PRT sebagai warga kelas 2.

"Selama ini nasib PRT diinjak, dianggap sebagai warga kelas 2, tidak diakui sebagai pekerja, tidak diberikan hak haknya dan dia bekerja dalam situasi eksploitatif di situasi perbudakan modern," kata Lita.

Lita mengatakan hingga kini DPR belum mengesahkan RUU PPRT. Hal itu membuatnya geram karena merugikan profesi PRT. "Selama ini DPR masih menyandera RUU PPRT. Menyandera RUU PPRT sama juga menyandera nasib PRT yang mereka menjadi korban perbudakan modern, korban kekerasan, korban dari tindak pidana perdagangan orang," imbuh Lita.

Dia menyebut tidak adanya UU yang melindungi hak PRT membuat para PRT tersebut diperlakukan semena-mena. Hal itu, kata Lita, sama saja dengan kasus tindak pidana perdagangan orang tapi ini di dalam negeri.

"Kemarin pemerintah liput soal tindak pidana perdagangan orang pada buruh migran. Padahal tindak pidana perdagangan orang juga terjadi PRT dalam negeri. Termasuk mereka PRT yang disandera oleh para

penyalur, disandera, disekap oleh majikan, disandera nasibnya yang tidak dibayar upahnya, disandera mereka tidak makan, seperti itu. Dan kasus-kasus yang tiap hari berjatuh-hatuh memperlihatkan nasib PRT disandera karena RUU-nya tidak disahkan," ujar Lita.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR yang juga anggota fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan DIM RUU PPRT yang telah diserahkan pemerintah untuk dibahas bersama DPR "sampai saat ini di tangan Ketua DPR Puan Maharani. Belum masuk Badan Musyawarah."

Tidak banyak anggota DPR atau tokoh-tokoh politik menaruh perhatian serius pada RUU ini. Selain karena isu ini bukan sesuatu yang menarik dan dapat membuat mereka mendulang suara dalam pemilu 2024 nanti, para politisi ini tampaknya juga mempekerjakan seorang atau lebih pekerja rumah tangga di rumah mereka – sebagaimana sebagian besar rumah tangga di Indonesia – dan menikmati situasi tanpa aturan hukum tentang hak dan kewajiban mereka. (wid,rls,ist/dya)

RUU PPRT BERISI TUJUH POKOK PEMIKIRAN TERKAIT RELASI DAN KEHIDUPAN PROFESIONAL PRT

1. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap PRT mengedepankan asas kekeluargaan sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Di sini, perjanjian kerja tertulis hanya diberlakukan pada PRT yang direkrut secara tidak langsung melalui penyalur PRT.
3. Penyalur PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum.
4. RUU PPRT juga mengatur mengenai bagaimana perlindungan terhadap PRT dari diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan, baik dari penyalur PRT maupun pemberi kerja, dijalankan.
5. RUU PPRT bicara mengenai bagaimana calon PRT mendapatkan pendidikan, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun dari Penyalur PRT.
6. Di dalam RUU juga termaktub ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT. Pengawasan terhadap penyelenggaraan PRT dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menanti Komunikasi Politik

Sementara itu, Ketua Pelaksana Percepatan Pembentukan UU PPRT Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyampaikan, terdapat 367 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)



Dirut Pertamina Bakal Sanksi Tegas Agen LPG Nakal

SURABAYA - Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, memberikan ultimatum pada para agen LPG yang nakal. Nicke menyampaikan akan menindak tegas bagi agen atau pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg tidak sesuai dengan aturan.

Nicke menyampaikan hal itu saat inspeksi mendadak (sidak) ke SPPBE di Pendungan, Denpasar, Bali Minggu (30/7/2023) sore. Dalam kesempatan itu dia menyakan bahwa stok LPG subsidi 3 Kg terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan yang ada di Bali, sehingga sekarang yang perlu diawasi adalah distribusinya hingga ke masyarakat untuk menghindari kelangkaan.

"Tadi saat sidak ada kejadian yang menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita awasi. Jadi kalau masyarakat mengetahui ada penyimpangan bisa segera dilaporkan ke 135," ujar Nicke dalam keterangan tertulis Minggu (30/7/2023).

Lebih lanjut Nicke menjelaskan, bahwa proses penjualan yang sesuai dengan alur distribusi LPG Subsidi 3 Kg akan menjaga harga jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Secara sistem seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya juga sudah jelas, ada peraturannya di tiap-tiap daerah sudah ada. Untuk di Bali ini harganya Rp 18.000. Itulah yang harus diikuti agar ada jaminan suplai, agar ada jaminan harga sesuai aturan," tuturnya.

Nicke menekankan, bahwa jika ada agen dan pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Pertamina tidak senang untuk menindaknya.

"Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak," ungkap Nicke dikutip dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com).

Lebih lanjut Nicke juga meminta bantuan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memahami bahwa LPG Subsidi 3 Kg peruntukannya adalah untuk masyarakat kurang mampu. Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melakukan registrasi menggunakan KTP untuk membantu pengawasan alokasi untuk memastikan penjualan tidak melebihi kuota, dan prioritas bagi masyarakat yang berhak.

"Registrasi di Bali ini sudah 94% termasuk yang tertinggi. Kita harapkan dengan registrasi ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk



Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, melakukan peninjauan di pangkalan LPG.

membeli juga membantu Pertamina mempertanggung jawabkan LPG Subsidi ini siapa yang menikmati," tutup Nicke.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau sejumlah pangkalan dan agen tabung gas LPG 3 Kg di Kota Batu, Sabtu (29/7/2023) sore. Peninjauan dilakukan di Pangkalan LPG milik Siadi di Jl Lesti Kelurahan Ngaglik dan Pangkalan UD. Wijaya Kusuma Jl. Diponegoro Kel. Sisir.

Usai peninjauan, Gubernur Khofifah memastikan bahwa pasokan LPG di Kota Batu dari hulu ke hilir dalam keadaan aman. Mulai dari terminal, Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG, agen, hingga pangkalan.

"Semoga kebutuhan ini senantiasa aman dan terpenuhi. Saya mengajak semua pihak terkait untuk bersama menjaga kelancaran distribusi LPG dari hulu ke hilir," tegasnya.

Saat berdialog dengan para pengelola pangkalan, Khofifah menemukan adanya lonjakan permintaan mulai hari Senin (24/7/2023). Bahkan, pangkalan Siadi di Ngaglik mengatakan 100 stok elpijinya ludes dalam waktu satu jam.

Untuk itu, Khofifah menegaskan, Pemprov Jatim telah melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk monitoring lebih intensif terhadap pasokan suplai. Apalagi di daerah-daerah yang terdapat banyak warung dan pedagang kaki lima yang menggunakan LPG.

"Tadi pemilik pangkalan LPG sempat menyampaikan memang sempat ada lonjakan permintaan, dan sekarang sudah kembali aman. Dua

hari ini saya juga melakukan monitoring supaya stok aman dengan Pertamina menambah pasokan," katanya.

Ditambahkan, Kota Batu memang menjadi daerah yang mengalami peningkatan permintaan LPG yang signifikan utamanya setiap akhir pekan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Sebab, mayoritas pedagang di Batu banyak yang bergerak di bidang kuliner.

Ia menyebutkan bahwa masyarakat tidak perlu risau karena Pertamina telah memastikan ketersediaan stok aman. Bahkan Pertamina juga akan menambah suplai LPG sebanyak 30% hingga 70% dari jumlah biasanya.

"Pada dasarnya stok dari Pertamina aman. Saat ini telah ditambah stoknya sesuai permintaan 30% sampai 70%. Saya sudah mengkoordinasikan agar Bupati Walikota kalau memang ada tambahan permintaan kuota sesuai kebutuhan masyarakat segera kordinasi dengan Pertamina sebagai bentuk mitigasi kita bersama," terangnya.

Secara khusus, Khofifah juga mengimbau pada masyarakat Kota Batu untuk senantiasa membeli LPG di pangkalan resmi dan membawa serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) mengingat Pertamina akan melakukan input data untuk kepentingan update data.

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Khofifah telah melakukan peninjauan di agen dan pangkalan LPG 3 kg di Surabaya. Suplai di Surabaya pun terbukti aman dan tidak ada kenaikan harga jika membeli di pangkalan.

"Kita bersyukur misalnya Surabaya supplainya aman, harganya juga stabil Rp16.000 di pangkalan. Apalagi Surabaya adalah kota besar dan merupakan wilayah aglomerasi. Ketersediaan Surabaya Raya harus diwaspadai bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur," tutupnya.

Sementara itu, Executive GM Pertamina Patra Niaga Jatim Bali Nusa

Tenggara Dwi Puja Ariestya mengatakan bahwa tambahan pasokan tabung LPG telah disalurkan sebanyak 1,5 juta tabung sejak 27 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023. Karenanya, ia mengajak masyarakat untuk membeli LPG langsung dari pangkalan dan bukan dari pengecer.

"Pertamina sudah menambah pasokan totalnya mencapai 1,5 juta tabung dan berlangsung sampai 31 Juli. Saat ini kita menganjurkan untuk membeli di pangkalan resmi karena stoknya akan selalu tersedia," katanya.

Di sisi lain, pemilik Pangkalan LPG 3 kg di Jalan Lesti IV/125 Batu, Siadi mengatakan, setiap hari pangkalan LPG miliknya mendapat kiriman 100 tabung dari Pertamina. Namun beberapa waktu belakangan pembeli meningkat. Sehingga saat ini pembeli diwajibkan menunjukkan KTP atau KK-nya.

Menurutnya, meningkatnya permintaan gas LPG 3 kg karena konsumennya sebagian besar merupakan pedagang makanan dan minuman. Tidak hanya itu, sebagian besar masyarakat juga banyak yang memiliki hajatan seperti pernikahan, pengajian dan lainnya.

"Dulu biasanya 100 tabung itu habisnya bisa siang atau sore, namun sekarang dari pagi toko buka jam 07.30 WIB itu antrean sudah panjang. Sejak hari Jum'at (28/7 red) permintaan kembali stabil, semoga setelah ini masyarakat bisa semua dapat jatah dan pasokan terjaga," tukasnya.

Turut mendampingi, Pj. Walikota Batu Aries Agung Paewai, Forkopimda Kota Batu, Kadisperindag Prov. Jatim Iwan, dan Ka ESDM Prov. Jatim Nurcholis. (lut/dya)



Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak,"

NICKE WIDYAWATI
Direktur Utama Pertamina



Terus Naik, Utang Indonesia Capai Rp 7.805,19 Triliun



Ilustrasi utang Indonesia

SURABAYA – Utang Indonesia bertambah lagi. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga 30 Juni 2023 mencapai Rp 7.805,19 triliun. Jumlah utang itu sudah naik Rp 50,21 triliun sepanjang tahun ini.

Pada 31 Januari 2023, posisi utang pemerintah Rp 7.754,98 triliun. Saat itu, rasio utang berada di level 38,56% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, rasio utang itu nilainya turun pada Juni 2023. Rasio utang terhadap PDB per Juni 2023 adalah 37,93% atau berada dalam batas aman sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (60% PDB).

Meski nilai utang meningkat, Kemenkeu mengaku bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali. "Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo," tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita, dikutip Minggu (30/7/2023).

Dalam penjelasannya, kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,49%.

Adapun komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,49 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa Surat Berharga Negara atau SBN yang mencapai 89,04 persen.

Selain itu, pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. "Per akhir Juni

2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ ATM) di kisaran 8 tahun," tertulis dalam catatan it dikutip dari cncbindonesia.com.

Selanjutnya, laporan itu mencatat, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDG (SDG Bond).

Selain itu, peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN, yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting. "Mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel," demikian catatan APBN Kita edisi Juni 2023.

Di satu sisi, Kemenkeu memastikan utang pemerintah digunakan untuk kegiatan yang sifatnya produktif. Secara umumnya digunakan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kegiatan proyek yang langsung dibiayai dari utang (earmark).

"Setiap rupiah utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang," jelas Kemenkeu dikutip dari detik.com.

Hal itu tercermin dari meningkatnya belanja yang sifatnya produktif dari tahun ke tahun seperti belanja infrastruktur naik 265% dari 2014 Rp 154,7 triliun menjadi Rp 410,7 triliun pada 2018, bahkan di 2019 naik lagi menjadi Rp 415 triliun. Begitu juga untuk belanja pendidikan meningkat 226% dari Rp 353,4 triliun

di 2015 menjadi Rp 444,1 triliun di 2018 dan Rp 492,5 triliun di 2019.

Belanja untuk kesehatan juga demikian, naik 186% dari Rp 59,7 triliun di 2015 menjadi Rp 111 triliun di 2018 dan naik lagi menjadi Rp 160 triliun di 2019. "Hal ini menunjukkan bahwa utang pemerintah melalui pembiayaan defisit digunakan dengan efisien untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Sementara itu, beban pembayaran bunga utang pemerintah tahun ini diperkirakan akan melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah pada 2023. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan pembayaran bunga utang pemerintah tahun ini di kisaran Rp 450 triliun hingga Rp 470 triliun.

Nilai tersebut lebih tinggi dari target yang sudah ditentukan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp 441,4 triliun. Bhima mengatakan, meningkatnya pembayaran bunga utang ini karena dampak dari tren suku bunga global yang masih tinggi, bahkan berpotensi terus meningkat.

Selain itu, penerimaan pajak masih belum maksimal, karena industri manufaktur yang menyumbang sebesar 30% dari total penerimaan pajak terlihat belum optimal dari sisi ekspansinya. "Maka proyeksinya beban pembayaran bunga utang termasuk dari bunga utang yang baru terbit bisa mencapai Rp 450 triliun hingga Rp 470 triliun tahun ini," tutur Bhima dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (30/7/2023).

Maka dari itu, dalam menghadapi beban bunga utang yang meningkat ini Bhima menyarankan pemerintah untuk lebih selektif dalam menerapkan kebijakan. Di antaranya, melakukan seleksi kebutuhan belanja yang bisa dihemat atau multiyears.

Kemudian, mengoptimalkan penerimaan pajak melalui implementasi pajak karbon, perluasan cukai dan mengejar kepatuhan wajib pajak kelas kakap. Membuka ruang renegosiasi utang dengan skema debt swap, seperti pengurangan utang untuk mendorong transisi energi. "Lalu opsi debt cancellation perlu dibahas dengan lembaga multilateral seperti bank dunia dan ADB (Asian Development Bank)," jelasnya.

Lantas mengapa negara Indonesia terus berhutang? Yang pertama karena pendapatan negara yang tidak pasti. Sumber pendapatan negara umumnya diperoleh dari pajak, non pajak, dan hibah. Meski demikian, setiap tahunnya tidak bisa dipastikan berapa dana yang akan terkumpul. Selain itu, umumnya sumber pendapatan tersebut tidak mencukupi untuk membiayai APBN (Anggaran

Pendapatan Belanja Negara) yang relatif besar.

Kedua, untuk mendongkrak instrumen pembangunan. Pembangunan harus terus berjalan agar pemerataan dan kemajuan dapat tercapai. Terlebih mengingat pengeluaran belanja dalam APBN yang cenderung meningkat setiap tahunnya yakni sebesar Rp1.806,5 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp2.750 triliun di tahun 2021, dikutip dari DJP Kemenkeu.

Di mana pengeluaran belanja akan digunakan untuk Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan kepada kementerian/ lembaga. Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan dana yang ditransfer ke masing-masing pemerintah daerah/pemda dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dan menjadi pendapatan pemda yang bersangkutan.

Ketiga, untuk menutupi defisit negara. Utang juga diperlukan untuk menutupi kekurangan dana yang dimiliki negara. Misalnya pada pandemi Covid-19 yang lalu, di mana sumber pendapatan negara yang harus berkurang cukup drastis. Namun di sisi lain pengeluaran biaya untuk belanja kesehatan seperti pengadaan vaksin, fasilitas dan alat kesehatan, bantuan sosial, kesehatan bagi masyarakat dan sebagainya yang semakin membengkak. (lut/dya)



"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo,"

SRI MULYANI
Menteri Keuangan



A portrait of Siti Badriah, a young woman with long, wavy brown hair, looking slightly to the left. She is wearing a light-colored top. The background is a soft, out-of-focus grey.

SITI BADRIAH

DAN TUMOR KELENJAR BETAH BENING

Foto-foto : Instagram/@sitibadriahh

PEMBENGGKAKAN kelenjar getah bening adalah gejala yang umum terjadi ketika tubuh berusaha melawan infeksi atau kondisi medis lainnya.

Sebenarnya, kelenjar getah bening berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dan berfungsi sebagai filter untuk membantu melawan infeksi.

Namun, jika kelenjar getah bening mengalami pembengkakan, bisa jadi ada masalah yang perlu ditangani.

Belakangan pedangdut Tanah Air, Siti badriah mengalami tumor kelenjar betah bening.

Awalnya perempuan yang akrab disapa Sibad itu menganggap itu hanyalah jerawat kecil.

"Dari awal kecil kayak jerawat," ujar Siti Badriah.

Namun, "jerawat" tersebut semakin membesar pada bulan berikutnya. "Bulan kedua makin besar, tapi yang kemarin mau lebaran Idul Adha agak segini, aku cuekin, bentar juga ilang," tutur Siti Badriah lagi.

"Besokannya cepat banget perputarannya. Hari ini besar dan besoknya besar segini (menunjukkan genggam tangan)," tambah Sibad.

Ibu satu anak itu pun menjalani operasi pengangkatan tumor kelenjar getah bening.

Profil

Sito Badriah merupakan penyanyi dangdut Indonesia yang populer lewat singlenya berjudul "Melanggar Hukum". Ia mulai menekuni dunia tarik suara sejak kecil. Bahkan saat kelas 2 SD ia sudah mulai menyanyi dari panggung ke panggung mengikuti orkes dangdut ayahnya.

"Sejak duduk kelas 2

SD saya sudah hidup di atas panggung, tapi waktu itu saya masih kecil dan tidak tahu apa-apa meski sudah berani menyanyi di hadapan orang banyak," ujar Siti, "Bahkan saya sudah keliling dan nyanyi bareng dengan sejumlah penyanyi ternama."

Suara Siti yang khas ternyata menarik perhatian pencipta lagu, Endang Raes. Menurut Endang, suara Siti yang kental dengan genre musik dangdut house membuatnya tertarik untuk membuatnya sebuah lagu dangdut. Akhirnya Endang menciptakan lagu "Melanggar Hukum" buat Siti dan membawanya ke perusahaan rekaman, Nagaswara.

Tak butuh waktu lama, single "Melanggar Hukum"(2011) akhirnya berhasil dirilis ke pasaran. Liriknnya yang sedikit nakal dan ikon rambut panjang selutut membuat Siti berhasil mencuri perhatian publik.

Setahun kemudian, penyanyi penyuka aksesoris perhiasan ini kembali ke blantika musik Indonesia dengan merilis dua single sekaligus, "Brondong

Tua" dan "Suamiku Kawin Lagi".

Namun sayangnya single "Brondong Tua" mendapat kritikan karena di beberapa nadanya menyerupai lagu milik girlband Korea Selatan, Wonder Girls- "Nobody".

Siti tak menampik bahwa lagu terbarunya memang lebih berwarna K-pop. "Di sini musiknya lebih ngebeat dan berwarna K-Pop," untkapnya.

Meski menuai kritikan namun ternyata single "Brondong Tua" begitu laris manis di pasaran. Bahkan lagu ini sempat masuk nominasi Anugerah Musik Indonesia 2012 kategori Karya Produksi Dangdut House atau Techno Terbaik.

Penyanyi yang akrab dengan

goyang manjur (maju-mundur) ini kembali merilis single keempatnya yang berjudul "Bara Bere", 2013. Single yang diciptakan oleh Endang Raes ini bercerita tentang seorang lelaki yang ingin mendapatkan cinta perempuan harus banyak Bara Bere (dalam bahasa Sunda artinya memberi).

Single ini lagi-lagi sukses di pasaran dan menjadikannya penyanyi dangdut yang cukup diperhitungkan di jagat musik Tanah Air. Bahkan sekali manggung Siti mendapat bayaran Rp 40 hingga 60 juta (berbagai sumber)



SAKIT LUAR BIASA,

APA ITU SINDROM CRP?

BELLA MACEY, seorang gadis berusia 10 tahun di Australia telah didiagnosis menderita kelainan saraf langka yang menyebabkan rasa sakit luar biasa di kaki kanannya.

Seperti dilaporkan Medical Daily, pada 17 Juli, anak perempuan itu didiagnosis menderita complex regional pain syndrome (CRPS), kelainan kronis yang sering disebut sebagai kondisi paling menyakitkan yang diketahui umat manusia. Kondisinya dipicu oleh infeksi pada kaki kanannya saat liburan keluarga di Fiji.

Sindrom nyeri regional kompleks telah membuat Macey terbaring di tempat tidur dan dia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa menderita rasa sakit yang menyiksa.

"Semuanya tajam, terbakar, menggelitik, semuanya sakit. Ini rasa sakit yang berbeda [yang] saya tidak pernah tahu mungkin. Saya tidak bisa mandi, bahkan dengan tisu, kalian tidak bisa menyentuhnya dengan apa pun, kalau tidak saya akan berteriak," kata Macey.

APA ITU SINDROM CRP?

Adalah suatu kondisi yang menyebabkan nyeri kronis yang biasanya berkembang setelah cedera, pembedahan, stroke, atau serangan jantung. Penyebab pasti dari kondisi langka ini belum diketahui. Dalam kebanyakan kasus, CRPS terjadi akibat trauma saraf atau cedera pada anggota tubuh yang terkena.

Gejala CRPS bervariasi. Paling sering, kondisi ini dimulai dengan nyeri berdenyut, bengkak, kemerahan, perubahan suhu dan hipersensitivitas pada lengan, tungkai, tangan atau kaki.

Pada beberapa orang, tanda dan gejala CRPS dapat hilang dengan sendirinya. Di tempat lain, kondisinya menjadi tidak dapat diubah setelah warna dan tekstur kulit, rambut dan kuku berubah, dan pasien menderita gejala seperti kejang otot dan pengengangan.

Sindrom CRP adalah kondisi yang relatif langka yang lebih sering menyerang orang dewasa daripada anak-anak. Sekitar 200.000 orang menderita kondisi ini setiap tahun di Amerika Serikat.

JENIS CRPS

CRPS tipe I terjadi tanpa kerusakan saraf setelah sakit atau cedera. Ini dikenal sebagai distrofi simpatik refleksi.

CRPS tipe II terjadi setelah kerusakan saraf. Kondisi yang juga dikenal sebagai kausalgia.

Faktor risiko yang meningkatkan risiko CRPS adalah kesehatan saraf yang buruk. Kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes dan neuropati perifer serta kebiasaan gaya hidup seperti merokok meningkatkan kerusakan saraf dan risiko pengembangan CRPS.

Kemudian masalah sistem kekebalan juga berpengaruh. Penyakit

autoimun dan orang dengan penyakit radang lainnya berisiko tinggi terhadap CRPS.

Adapula faktor genetika. Para peneliti percaya bahwa meskipun jarang, gen memengaruhi kemampuan seseorang untuk pulih dari cedera.

TES CRP

Mengutip halodoc mungkin memerlukan tes ini jika memiliki gejala infeksi bakteri, seperti:

- Demam atau menggigil.
- Detak jantung cepat.
- Pernapasan cepat.
- Mual dan muntah.

Anda mungkin juga memerlukan pemeriksaan CRP jika dokter menganggap kamu mungkin memiliki kondisi kronis yang menyebabkan peradangan. Gejalanya akan tergantung pada kondisinya.

Jika Anda mendapat diagnosis dengan infeksi atau penyakit kronis yang menyebabkan peradangan, mungkin memerlukan tes ini untuk memantau kondisi dan pengobatan.

Pemeriksaan CRP hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Sebelum prosedur, Anda akan diminta duduk di kursi. Petugas akan menanyakan lengan mana yang ingin kamu gunakan.

Lalu, pengambilan darah dilakukan sebagai berikut:

■ Pita elastis diikatkan di lengan atas untuk membantu vena lebih terlihat.

■ Lalu, kulit dibersihkan dengan kapas beralkohol.

■ Sebuah jarum kecil dimasukkan ke dalam vena. Kamu mungkin merasakan sedikit sakit seperti cubitan atau tusukan.

■ Kemudian, darah ditarik ke dalam tabung vakum melalui tabung tipis yang terhubung ke jarum.

■ Setelah cukup darah diambil, pita elastis akan dilepas dan jarum dicabut.

■ Petugas akan menekan tempat tusukan dengan bola kapas, dan memasang perban perekat (Ant)



TIKTOK RILIS FITUR TEKS MIRIP INSTAGRAM SAAT TWITTER BERUBAH JADI X

TIKTOK menghadirkan fitur anyar yang menyerupai yang ada di Instagram, yaitu fitur teks. Lewat fitur ini, pengguna bisa membagikan konten dalam bentuk teks yang bisa dielaborasi dengan suara hingga stiker.

Raksasa media sosial ini baru saja mengumumkan fitur komposisi teks yang memungkinkan pengguna untuk "berbagi cerita, puisi, lirik, dan konten tertulis lainnya, memberikan mereka cara lain untuk mengekspresikan diri."

"Hari ini kami dengan senang hati mengumumkan perluasan postingan teks di TikTok, sebuah format baru untuk membuat konten berbasis teks yang memperluas pilihan bagi para kreator untuk berbagi ide dan mengekspresikan kreativitas mereka," mengutip Newsroom TikTok.

Perangkatnya tampak cukup sederhana. Cukup buka halaman Kamera pada aplikasi TikTok dan pilih dengan menggesernya ke "teks".

Pengguna bisa mengetikkan apa pun yang diinginkan, menambahkan suara, menandai lokasi, mengaktifkan komentar dan bahkan mengintegrasikannya dengan fitur Duets.

Perusahaan mengatakan bahwa kiriman teks ini akan sama interaktif dan dinamisnya dengan kiriman video dan foto.

Untuk itu, pengguna juga bisa menambahkan warna latar belakang, tagar, dan tentu saja membubuhkan banyak stiker.

Sama seperti postingan video dan foto, pengguna bisa menyimpan postingan teks apa pun sebagai draf untuk diedit lebih lanjut atau menghapusnya jika tidak ingin seluruh jagat maya melihat postingan Anda.

Ini bukan pertama kalinya TikTok mencari inspirasi dari Instagram. Pada tahun lalu TikTok menambahkan gambar statis ke dalam perangkatnya, yang menyertai video berdurasi pendek.

Dikutip dari Engadget, mode slide

foto TikTok disambut dengan antusias pengguna dan menjadi sangat populer. Perusahaan tentu berharap mode teks ini akan mengikuti jalur yang sama.

Momen perilisan fitur teks itu bertepatan dengan proses rebranding Twitter menjadi X. Twitter sendiri merupakan media sosial berbasis teks yang sudah lama menguasai segmen ini.

Pasarnya sempat digoyang Threads, 'adiknya' Instagram, meski tak lama.

Sebelumnya, CEO Instagram, Adam Mosseri angkat bicara soal kritik kepada platformnya. Instagram dikritik karena dianggap terus meniru TikTok dan tak lagi mengutamakan konten foto melainkan video.

Kritikan antara lain datang dari Kim Kardashian dan saudarina, Kylie Jenner. Mereka mengunggah foto yang intinya meminta Instagram kembali kepada titahnya.

Dua selebritas Amerika Serikat (AS) itu mengunggah kata-kata yang berasal dari salah satu pengguna dengan akun @illumitati, yang berprofesi sebagai fotografer fashion. Dalam unggahannya, terdapat kata-kata, "Make Instagram Instagram Again (Stop trying to be TikTok, I just want to see photos of my friends) Sincerely, Everyone."

"Buat Instagram, menjadi Instagram kembali. (Berhentikan mencoba menjadi TikTok, saya hanya ingin melihat foto-foto teman saya) Tertanda, para pengguna,"

Mosseri pun mengunggah video singkat dalam akunnya demi menjawab kritikan itu. Mosseri mengakui Instagram sedang bereksperimen dengan beberapa hal. Ia menegaskan, Instagram tetap mendukung foto.

"Saya ingin menjelaskan. Kami akan terus mendukung foto. Itu bagian dari warisan kami," katanya.

Hanya saja, Mosseri mengakui, Instagram akan tetap mengutamakan konten video. Menurutnya, Instagram



hanya mengikuti kebiasaan para penggunanya.

Instagram berubah dengan sangat cepat dalam beberapa bulan terakhir demi bersaing dengan TikTok lewat fitur Reels. Selain itu, Instagram juga lebih mengutamakan konten video untuk disajikan di feed penggunaannya, meski si pengguna tak mengikuti akun tersebut.

Mosseri mengatakan, ia sebetulnya juga ingin melihat konten dari teman yang diikutinya. Hanya saja, konten-konten itu kini berada di Direct Message dan Stories. (berbagai sumber)

KEUNGGULAN TEMPE DIBUNGKUS PLASTIK DIBANDING DAUN PISANG

NYARIS hampir seluruh penduduk Indonesia doyan makan tempe. Apalagi harga murah, mudah didapat, dan paling penting bisa diolah menjadi beragam masakan jadi keunggulan bahan makanan dari kedelai ini.

Cuma yang kerap jadi pertanyaan adalah saat kita membelinya di pasar.

Yang unik, tempe dijual dalam dua bentuk kemasan. Apakah yang dibungkus plastik atau yang menggunakan daun pisang.

Hal ini kerap membingungkan konsumen, mana yang lebih baik. Ternyata tempe yang dibungkus plastik punya keunggulan.

Kelebihan tempe bungkus plastic

Kini tak perlu khawatir lagi sebab kini terbukti kelebihan tempe yang dibungkus plastik dan daun pisang.

Awalnya tempe hanya dibuat menggunakan daun pisang sebagai pembungkusnya.

Namun semakin lama daun pisang semakin sulit ditemukan dan di-pilihlah plastik sebagai penggantinya.

Dikutip dari Kompas, Kepala Koperasi Pengusaha Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kabupaten Bogor, Sukhaeri mengatakan tempe dibungkus daun pisang dengan tempe dibungkus plastik sama-sama memiliki ke-kurangan dan kelebihan masing-masing.

Dari segi kebersihan dan keamanan, tempe dibungkus plastik lebih unggul daripada tempe di-bungkus daun pisang.

Dalam proses pembuatan tempe digunakan ragi yang akan meng-hasilkan bakteri baik hasil proses fermentasi yang sangat sensitif terhadap bakteri pencemar.

Ketika membungkus tempe dengan daun pisang, maka harus dipastikan daun pisang yang diguna-kan sudah bersih dan tidak tercemar.

Apabila daun pisang yang digunakan tidak dibersihkan dengan baik, maka kemungkinan bakteri jahat ikut tumbuh dan berkembang dalam tempe bisa terjadi.

Apalagi jika dalam proses pembuatan tempe terdapat celah daun yang sobek sehingga memudahkan bakteri untuk masuk.

Berbeda dengan plastik sebagai pembungkus yang lebih kedap udara sehingga terjamin kebersihan dan keamanannya.

Meski begitu tempe dibungkus daun lebih unggul dari segi rasa dan kenikmatannya.

"Seperti makan nasi aja kalau nasi uduk dibungkus dengan daun pasti kan lebih wangi dan aromanya khas.

Begitupun tempe bungkus daun, keunggulannya lebih enak," ujar Sukhaeri pada KompasTravel saat berkunjung ke Rumah Tempe Indonesia (RTI).

Makanan dibungkus daun pisang

Daun pisang memang sejak lama sudah diketahui manfaatnya sebagai

pembungkus makanan.

Tak hanya tempe, masyarakat Indonesia juga kerap menggunakan daun pisang untuk membungkus makanan seperti lontong, pepes, dan juga botok.

Rupanya membungkus makanan menggunakan daun pisang tak hanya memberikan kenikmatan semata.

Ada beragam manfaat yang bisa didapatkan dari makanan yang dibungkus menggunakan daun pisang.

Daun pisang diketahui memiliki senyawa alami yang disebut dengan polifenol seperti epigallocatechin

gallate atau EGCG.

Senyawa ini merupakan anti-oksidan alami yang dapat memerangi radikal bebas dan mencegah penyakit, sama seperti antioksidan yang ditemukan dalam teh hijau.

Selain itu, berbeda dengan pembungkus makanan sintetik, daun pisang lebih alami dan ramah lingkungan.

Selain karena tidak mengandung zat kimia berbahaya, daun pisang juga mudah diurai oleh alam sehingga tidak menambah permasalahan lingkungan akibat sampah (*)



Kala KPK-TNI (dari hal 1)

KASUS dugaan suap yang menyeret Kepala Basarnas Marsdyo Henri Alfiandi bergulir menjadi polemik. Puspom TNI menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengumumkan Henri serta anak buahnya, Koordinator Administrasi (Kooramin) Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan di Basarnas tidak tepat.

Persoalannya adalah saat kasus itu diumumkan setelah proses operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Henri dan Afri merupakan perwira militer aktif. Menurut Puspom TNI, proses penyidikan terhadap perwira militer aktif yang diduga melakukan tindak pidana harus dilakukan oleh mereka, termasuk penerbitan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan permohonan maaf. Di hadapan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung dan rombongan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Tanak menyebut ada kekhilafan yang dilakukan oleh penyidik.

"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasannya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK," ungkap Johanis Tanak.

Sedangkan menurut KPK, mereka sudah menemukan bukti kuat atas dugaan keterlibatan Henri dan Afri dalam kasus itu. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait keterbukaan atas proses penyidikan terhadap Henri dan Afri. Karena status mereka sebagai militer, maka proses yang dilakukan pun tidak mengikuti aturan yang diberlakukan bagi kalangan sipil. Persoalan lainnya adalah potensi impunitas atau kebal hukum jika proses hukum terhadap Henri dan Afri dilakukan secara tertutup oleh Puspom TNI.

Menanggapi polemik itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta supaya persoalan penetapan tersangka Henri Alfiandi segera diselesaikan oleh KPK dan Puspom TNI. "Polemik terkait dengan penetapan tersangka terhadap perwira TNI aktif ini diakhiri dan selanjutnya baik KPK maupun Puspom TNI membentuk tim koneksi untuk melakukan proses terhadap dua perwira TNI aktif tersebut," ujar Arsul. Arsul menyatakan KPK dan TNI harus menunjukkan sinergitas dalam proses penegakan hukum. Sehingga pengusutan perkara bisa berjalan optimal.

"Dengan demikian nantinya akan ada paralelitas dan sinkronitas antara proses hukum terhadap warga sipil dan perwira TNI aktif yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut," kata dia.

La pun meminta agar gesekan antara KPK dan TNI soal penetapan tersangka tidak diperpanjang. Apalagi, kedua pihak telah bertemu guna membahas penanganan perkara tersebut. Arsul tak ingin proses penanganan perkara tidak berjalan

dengan baik. Ia mencontohkannya dengan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter AW-101 tahun 2015-2017. Saat itu Puspom TNI menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada lima tersangka dari unsur militer yang diduga terlibat.

"Jangan sampai terjadi lagi seperti pada kasus tindak pidana korupsi Helikopter AW-101, di mana orang sipilnya diproses hukum dan dipidana penjara plus denda, namun tak demikian dengan perwira TNI yang diduga terlibat," imbuh dia.

Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI membentuk tim koneksi. Dia menilai proses penyidikan terhadap Henri dan Afri sebaiknya dilakukan secara bersama-sama oleh kedua institusi itu, ketimbang berjalan masing-masing. Menurutnya, pembentukan tim itu bakal lebih menjamin rasa keadilan, menghindari disparitas, dan memudahkan proses penanganan perkara. "Dibandingkan, cara kedua, diselesaikan sendiri-sendiri. KPK menyelesaikan (perkara dugaan korupsi) orang sipilnya, TNI menyelesaikan anggotanya," kata Zaenur.

Zaenur juga menyinggung soal penanganan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter Augusta Westland (AW) - 101. Dalam pandangannya, publik tidak puas dengan penyelesaian kasus tersebut. Sebab, hanya pihak sipil yang akhirnya divonis bersalah. Sementara itu, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengeluarkan menghentikan penyidikan pada lima anggotanya yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi tahun 2015-2017 itu. "Kasus ini penuh tanda tanya, publik mempertanyakan pada TNI, apakah kasus tersebut sudah tuntas atau belum," ujarnya.

Didesak Diganti

Kritikan serupa dilontarkan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik keras pimpinan KPK Johanis Tanak yang menyatakan penyidik dan penyidik khilaf terkait OTT di Basarnas. MAKI mendorong agar putusan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan KPK jadi 5 tahun tak diterapkan di era Firli Bahuri dkk.

"Untuk itu makanya saya kan udah ngamuk-ngamuk kemarin itu, masa menyalahkan penyidik dan penyidik wong jelas-jelas ada gelar perkara, ekspos dan kemudian yang jumpa pers juga Pak Alex Marwata, nah kemudian membuat pernyataan Pak Tanak yang khilaf adalah penyidik dan penyidik. Setelah kita ramai lagi Pak Marwata mengakui yang khilaf pimpinan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Boyamin menilai tidak ada prestasi yang bisa diharapkan dari pimpinan KPK saat ini. Dia menyoroti pimpinan KPK lainnya yang tak bersuara soal operasi tangkap tangan yang melibatkan Kabasarnas Marsdyo Henri Alfiandi ini. "Nah ini kan udah nggak bisa diharapkan lagi prestasi

yang hendak kita tempuh dari pimpinan yang sekarang ini. Sementara Pak Ghufron cari selamat tetap terpilih lagi, terus kemudian Pak Nawawi juga diam menjadi biksu, mau diharapkan apa pimpinan sekarang ini," jelasnya.

"Maka seperti yang saya ajukan ke Mahkamah Konstitusi meminta bahwa 5 tahun itu periode berikutnya berlakunya bukan periode yang sekarang, sehingga langsung otomatis jadi 5 tahun ditambah setahun, itu nggak bisa. Karena kan masa jabatan 5 tahun, 5 tahun itu kan yang dipilih," imbuhnya.

Boyamin menilai masa jabatan Firli dkk tidak patut diperpanjang 1 tahun lagi. Sebab, menurutnya pimpinan KPK saat ini tidak berprestasi hingga terlibat pelanggaran kode etik. "Salah satu alasan saya tidak diperpanjang periode ini karena tidak berprestasi dan melanggar kode etik dan banyak hal kontroversi yang lain, dan saya juga berencana melaporkan pimpinan KPK untuk pelanggaran kode etik terkait dengan sengkabut koneksi OTT TNI ini, terutama yang menyalahkan penyidik dan penyidik ini, itu udah fatal itu," jelasnya.

Boyamin juga menyinggung soal profesionalisme pimpinan KPK saat ini. Dia menilai harusnya kasus yang melibatkan militer aktif harus melibatkan TNI. "Dan sisi lain juga memang pimpinan KPK sangat tidak mumpuni, tidak profesional. Jelas-jelas ini dilakukan tentara, ya tentara koneksi. Minimal koneksi kalau ndak ya diserahkan, ndak bisa KPK mengumumkan sendiri, itu nggak bisa, itu pelanggaran berat menurut saya," tutur dia.

Lebih lanjut, MAKI meminta Mahkamah Konstitusi membuat putusan agar masa jabatan pimpinan KPK 5 tahun itu berlaku untuk periode mendatang. "Jadi satu hal ini pelanggaran berat, kedua Mahkamah Konstitusi saya minta untuk membuat putusan seperti yang saya ajukan kemarin, untuk menyatakan bahwa 5 tahun itu berlaku untuk periode yang akan datang. Salah satu alasan saya itu kan kalau Indonesia negara hukum dan dasarnya asas manfaat, selain kepastian dan keadilan. Nah ini kalau diberikan sekarang tidak bermanfaat, malah mudarat, banyak keburukannya nanti. Jadi jangan dikasihkan yang periode sekarang," tutur dia.

Terpisah, Pakar Hukum Feri Amsari menilai Pimpinan KPK telah melanggar hukum dan harus bertanggung jawab. Sebab, segala proses hukum di KPK selalu di bawah pimpinan, termasuk soal operasi tangkap tangan (OTT) Kooramin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.

"Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU KPK, seluruh proses penyidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK itu di bawah pimpinan KPK. Sehingga penentuan tersangka dan segala macam tentu dikoordinasi oleh pimpinan KPK," kata Peneliti senior Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unan), Padang, Sumatera Barat itu, Minggu (30/7/2023).

Sebelumnya, dalam pernyataan Johanis, Pimpinan KPK seolah melimpahkan tanggung jawab ke

penyidik. "Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyidik kami mungkin ada kekhilafan, kelupaan, bahwasannya manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani," ujar Johanis di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023).

Feri lantas mempertanyakan, apakah pimpinan KPK memahami UU KPK atau belum. Sebab, hal terkait menjadi kealpaan besar bila Pimpinan KPK tidak memahami ketentuan Pasal 42 UU KPK yang menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk perkara yang berkoneksitas itu dipimpin oleh KPK.

"Artinya, KPK tidak menyadari batasan-batasan kewenangannya, sehingga kemudian penetapan tersangka melampaui batas kewenangan, padahal mestinya dikoordinasikan dengan baik," jelas pria yang juga seorang peneliti senior dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unan) ini. (wid,rls,ant/dya)

OTT TERSANGKA SUAP DI BASARNAS

PENERIMA SUAP



Marsekal Muda TNI Henri Alfiandi (HA) Kepala Basarnas



Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) Koordinator Administrasi Kepala Basarnas

PEMBERI SUAP



MG Komisararis Utama PT MGCS



MR Direktur Utama PT IKG



RA Direktur Utama PT KAU

BARANG BUKTI



Uang tunai Rp999,7 juta

PELANGGARAN PASAL

- Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Soal Kesepakatan Ekonomi Xi-Jokowi Pemerintah Indonesia Diminta Hati-hati



Presiden Joko Widodo saat menyaksikan penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama dalam membangun ekosistem hilirisasi industri kaca dan panel surya di Indonesia di Hotel Shangri-La, Chengdu. (Dok.pri)

JAKARTA-Meski minus kehadiran para Menteri Koordinator Kebijakan Ekonomi, Menteri Keuangan dan Bappenas, pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden China Xi Jinping, serta masing-masing delegasi di Kota Chengdu, menghasilkan delapan kesepakatan.

Diantaranya kesepakatannya adalah Protokol tentang Persyaratan Pemeriksaan dan karantina untuk Ekspor Serbuk Konjac dari Indonesia ke Tiongkok, Protokol tentang Persyaratan Phytosanitary untuk Ekspor Tabasheer dari Indonesia ke Tiongkok, Rencana Aksi Kerja Sama Bidang Kesehatan.

Kemudian, Nota Kesepahaman tentang Pusat Penelitian dan Pengembangan Bersama, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perencanaan Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman terkait Pemandangan Ibu Kota Baru Indonesia, Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok "Two Countries, Twin Parks, Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Bahasa Tiongkok dan terakhir Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Ekonomi dan Teknis.

Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulisnya Minggu (30/7/2023) memaparkan, ada tiga kehati-hatian Indonesia dalam kesepakatan ekonomi dengan China tersebut

Pertama, Kehati-hatian dalam menjaga stabilitas kawasan, pemerintah harus tetap kritis dan berhati-hati dalam mengelola dukungan China terhadap Indonesia dalam kepemimpinan ASEAN. Pastikan bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia tidak terkompromi.

Kedua, Pemerintah harus lebih terbuka dan transparan dalam menyajikan bukti konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama dengan Cina. Diperlukan kajian yang mendalam untuk menghindari potensi risiko yang mungkin timbul dari kesepakatan bilateral.

Ketiga, Pemerintah harus memastikan bahwa kemitraan dengan China memberikan keuntungan ekonomi dan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Prinsip kesetaraan dan kepentingan nasional harus dijunjung tinggi agar keuntungan dari kemitraan ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Hubungan Indonesia dengan China harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi dan keberanian untuk memaparkan risiko jangka panjang yang akan dihadapi Indonesia.

Dalam menghadapi potensi risiko tersebut, pemerintah harus bertindak lebih transparan, kritis, dan berpihak pada publik banyak dalam menjalankan kesepakatan dengan China agar Indonesia dapat menjalankan hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.

Bahkan pemilihan pertemuan di Kota Chengdu dinilai tepat. Presiden Jokowi dibuat terkesan dengan pembangunan kota, infrastruktur jalan dan kemegahan bangunan terluas didunia. "Presiden Xi Jinping sangat cerdas karena mengetahui ambisi Presiden Jokowi ingin memiliki IKN namun belum punya investor dan tata kota barunya," kata Achmad. Menurut dia, seolah China siap menjadi mitra strategis jangka panjang Indonesia dalam membangun IKN.

Selain itu, terlalu bergantung pada China bisa menimbulkan risiko besar bagi Indonesia karena masalah keamanan dan kestabilan yang melibatkan China dalam beberapa tahun terakhir. "Selain itu, klaim Presiden Jokowi tentang "kemajuan konkret" dalam kerja sama Indonesia dan Cina, terutama setelah G20 di Bali pada tahun sebelumnya, juga menimbulkan banyak keraguan. Ada beberapa pertimbangan kritis mengenai hubungan ini yang mungkin memiliki risiko riil yang harus dihadapi," ungkap dia.

Achmad mengatakan, perlu adanya bukti yang lebih transparan dan konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama ini. Indonesia seharusnya tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional hanya untuk memenuhi Ambisi China menjadi ekonomi berpengaruh di dunia tanpa memastikan kesepakatan bilateral tersebut memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia. Misalnya Publik melihat kepentingan ekonomi China dalam mendominasi hilirisasi nikel telah merugikan publik karena tenaga kerja yang digunakan bukan mayoritas bangsa Indonesia.

Menu yang Hilang Diganti

Di sisi lain terkait isu dalam negeri China, Diplomat senior Wang Yi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu). Dirinya kembali menempati posisi Menlu ini setelah rekannya Qin Gang tiba-tiba menghilang.

Qin Gang diketahui menghilang sejak sebelum lalu. Padahal sosoknya terpilih menggantikan Wang setelah badan legislatif tertinggi negara, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPCSC). Beberapa pihak mengutip alasan kesehatan menjadi sebab Qin jarang terlihat di publik beberapa pekan terakhir. Mengutip Al Jazeera, Qin terakhir terlihat di depan umum pada 25 Juni, ketika dia mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekannya dari Rusia, Vietnam, dan Sri Lanka.

Sejak itu, dia secara mencolok absen dari tugasnya pada saat aktivitas diplomatik yang intens untuk Beijing. Termasuk upaya untuk menstabilkan hubungan dengan AS. Qin sebenarnya pun dijadwalkan untuk bertemu dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell pada 4 Juli. Tetapi pejabat UE mengumumkan bahwa China membatalkan pembicaraan tanpa penjelasan dengan peringatan hanya beberapa hari.

Qin kemudian gagal menghadiri pertemuan yang diawasi ketat dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan utusan iklim AS John Kerry. Kementeriannya mengatakan pada 11

Juli bahwa dia tidak dapat menghadiri pertemuan ASEAN di Indonesia karena alasan kesehatan.

Di tengah kekosongan ini, Wang Yi yang merupakan sahabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan turun tangan. Sebelum pensiun, Wang yang berusia 69 tahun itu memegang jabatan menteri luar negeri selama hampir satu dekade sejak 2013. Adapun, peran ganda Wang disebutkan membuat beberapa analis percaya bahwa pengangkatannya bisa bersifat sementara sampai menu baru lainnya ditunjuk. (wid,rls,cnbc/dya)

8 KESEPAKATAN HASIL PERTEMUAN JOKOWI-XI JINPING

- 1 Protokol tentang Persyaratan Pemeriksaan dan karantina untuk Ekspor Serbuk Konjac dari Indonesia ke Tiongkok
- 2 Protokol tentang Persyaratan Phytosanitary untuk Ekspor Tabasheer dari Indonesia ke Tiongkok.
- 3 Rencana Aksi Kerja Sama Bidang Kesehatan.
- 4 Nota Kesepahaman tentang Pusat Penelitian dan Pengembangan Bersama
- 5 Nota Kesepahaman tentang Kerja Pengetahuan dan Pengalaman terkait Pemandangan Ibu Kota Baru Indonesia.
- 6 Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok "Two Countries, Twin Parks.
- 7 Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Bahasa Tiongkok.
- 8 Nota Kesepahaman tentang Pusat Penelitian dan Pengembangan Bersama

